



ABSTRAK

Transisi energi menjadi agenda utama Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan di tengah krisis iklim. Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mencapai *Net Zero Emission*, salah satunya melalui rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Namun, hal ini tidak mudah dilakukan karena batu bara merupakan komoditas yang berkontribusi tinggi pada perekonomian Indonesia. Untuk itu, Indonesia mengadopsi skema *co-firing*, yaitu skema pembakaran dua jenis bahan bakar, seperti batu bara dan biomassa dalam satu pembangkit listrik. Skema ini menimbulkan respons yang beragam di publik. Dengan menggunakan konsep *sociotechnical imaginaries* (STIs), penelitian ini secara kritis mengkaji dan mengungkap imaji pemerintah dan *non-governmental organization* (NGO) yang berperan sebagai perwakilan suara publik mengenai *co-firing*. Melalui penelitian ini, ada tiga temuan utama, yakni ditemukan perbedaan imaji masa depan energi yang kontras antara pemerintah dan NGO. Kedua, dan perbedaan cara memandang risiko kedua aktor tersebut dalam menanggapi *co-firing* karena perbedaan visi, perspektif, dan kepentingan sehingga menghasilkan perbedaan prioritas keduanya dalam agenda transisi energi. Ketiga, adanya dinamika kekuasaan antara pemerintah dan NGO yang dipengaruhi kuat oleh dominasi rezim batu bara sehingga menciptakan pembuatan kebijakan energi yang eksklusif. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap studi STIs, tetapi juga memberikan gambaran mengenai proses kebijakan energi di Indonesia masih dipengaruhi dominasi rezim batu bara. Oleh karena itu, studi ini juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan transisi energi yang ideal di masa depan.

Kata Kunci: *sociotechnical imaginaries*, transisi energi, Indonesia, kebijakan energi

ABSTRACT

The energy transition has emerged as Indonesia's primary focus for achieving a sustainable future in the context of the climate crisis. Indonesia has implemented several measures to attain Net Zero Emission, including the early retirement of coal-fired power plants (PLTU). However, implementation is challenging due to coal's major contribution to Indonesia's economy. Consequently, Indonesia has implemented a co-firing method that includes the combustion of two fuel sources, namely coal and biomass, within a single power plant. This scheme has provoked various reactions from the public. This research uses the notion of sociotechnical imaginaries (STIs) to critically analyze and understand the representations of the government and non-governmental organizations (NGOs) as they articulate the public perspective on co-firing. This research reveals three primary conclusions, specifically the identification of divergent perspectives on the future of energy between the government and non-governmental organizations. The disparity in risk perception about co-firing between these two players arises from their divergent visions, perspectives, and interests, leading to varying priorities in respective energy transformation agendas. Third, a power dynamic exists between the government and NGOs, significantly shaped by the predominance of the coal regime, leading to the formulation of exclusive energy policies. This research enhances STI studies and offers an overview of Indonesia's energy policy process, which remains affected by the predominance of the coal regime. Lastly, this research offers actionable recommendations for realizing optimal energy transition objectives in the future.

Keywords: *sociotechnical imaginaries, energy transition, energy policy*